

Lampiran 2. Hasil wawancara tentang interaksi eksekutif-legislatif dalam perumusan peraturan daerah APBD

No	Informan	Hasil Interview
1	Irianto, (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung) Selasa, 06 Desember 2011	SKPD mengajukan draf kepada bagian Hukum untuk diteliti dan diproses, selanjutnya bagian Hukum membuat undangan dengan tim teknis Prolegda dan mengadakan rapat pembahasan Raperda untuk menerima masukan-masukan dari SKPD terkait. Bagian hukum meminta kepada SKPD berupa hasil rapat (pembahasan RAPBD) untuk dicetak sebanyak 45 untuk anggota DPRD berikut naskah Akademis. Setelah itu Bagian Hukum membuat Berita Daerah tentang penyampaian Raperda tentang APBD tahun 2012, untuk disampaikan kepada DPRD Kota Bandar Lampung untuk dibahas bersama.
2	Wilson Faisal SE. MM (Kepala Bagian BPKAD Kota Bandar Lampung) Jumat, 09 Desember 2011	Interaksi Eksekutif – Legislatif setelah Prolegda dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota berjalan dengan persetujuan dan penandatanganan dari Walikota dan DPRD merupakan dasar untuk menyusun RAPBD tentang Program Kerja Daerah dengan dinas terkait. Contoh Dinas PU (infrastruktur perbaikan jembatan, jalan kota, dan Kota Baru), Kesehatan, Pendidikan. Anggaran diperoleh dari Pusat, PAD, dan DAK sebagai sumber dana untuk Program Kerja Daerah 2012.
3	Febrilia Sastra Mega, SP. MT (Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Jumat, 09 Desember 2011	Interaksi Eksekutif dan Legislatif saling berkoordinasi antara TAPD dan DPRD karena BPKAD merupakan bagian dari TAPD dengan dikoordinasikan Sekretariat Daerah membawahi: Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Buku, Bagian Keuangan, Penyusun Program) untuk menghasilkan APBD.
4	Drs. Zainnudin (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Senin, 12 Desember 2011	Dilakukan dalam bentuk koordinasi melalui pembahasan bersama tentang APBD mutlak dan berjalaml dengan baik
5	Benson Werta SH (anggota Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung) Selasa, 13 Desember 2011	Baik eksekutif dan legislatif sama-sama mempunyai inisiatif merancang peraturan daerah

Lampiran 3. Hasil wawancara interpendensi lembaga eksekutif-legislatif dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD

No	Informan	Hasil Interview
1	Irianto, (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung) Selasa, 06 Desember 2011	Kebanyak peraturan daerah berasal atau bersumber dari eksekutif, DPRD kuang inisiatif. Karena eksekutif lebih mengetahui kebutuhan dan keperluan daerah.
2	Wilson Faisal SE. MM (Kepala Bagian BPKAD Kota Bandar Lampung) Jumat, 09 Desember 2011	BPKAD sebagai TAPD saling berkoordinasi atau saling terkait dalam penyusunan perda APBD. Eksekutif lebih mendominasi apalagi permasalahan APBD.
3	Febrilia Sastra Mega, SP. MT (Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Jumat, 09 Desember 2011	Eksekutif mengetahui kekurangan pemerintahan maka wajar saja eksekutif lebih mendominasi
4	Drs. Zainnudin (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Senin, 12 Desember 2011	Interpendensi terlihat jelas dari DPRD maupun TAPD terlihat saran dan masukan dari masing-masing pihak dalam pembahasan anggaran sehingga bisa proposional dalam artian biaya belanja pegawai dan biaya belanja publik sesuai dengan peraturan yang berlaku
5	Benson Werta SH (anggota Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung) Selasa, 13 Desember 2011	Pengajuan KUA dan PPAS dilakukan oleh Walikota kepada DPRD dalam rapat paripurna, setelah itu dibahas oleh komisi-komisi dan hasil pembahasan dilaporkan kepada Badan Anggaran

Lampiran 4. Hasil wawancara negosiasi lembaga eksekutif-legislatif dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD

No	Informan	Hasil Interview
1	Irianto, (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung) Selasa, 06 Desember 2011	Negosiasi terjadi antara eksekutif dan legislatif, karena adanya mutualisme politik antara dua lembaga ini dalam membuat kebijakan daerah.
2	Wilson Faisal SE, MM (Kepala Bagian BPKAD Kota Bandar Lampung) Jumat, 09 Desember 2011	Anggaran daerah memang dirancang oleh eksekutif, karena yang melaksanakan kegiatan adalah eksekutif. Oleh karena itu eksekutif dengan pihak dinas-dinas terkait membuat satuan kerja pemerintah daerah. Tidak ada negosiasi lagi.
3	Febrilia Sastra Mega, SP. MT (Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Jumat, 09 Desember 2011	Penyusunan RAPBD oleh bappeda berdasarkan PPAS dan sesuai visi misi Walikota, lalu disampaikan kepada DPRD dan dibahas TAPD-DPRD (banang). Setelah ditentukan pagu anggaran oleh DPRD barulah dibahas dalam rapat
4	Drs. Zainnudin (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Senin, 12 Desember 2011	Pembahasan RAPBD bernegosiasi secara demokratis, karena semua anggota Banang maupun masyarakat luas bisa mengikuti pembahasan anggaran. Khususnya anggota DPRD diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengkaji, menelaah, dan mengkritisi RAPBD
5	Benson Werta SH (anggota Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung) Selasa, 13 Desember 2011	Komisi bertugas membahas pagu, dan menentukan pagu. Barulah dibahas dalam rapat. Dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD dilakukan komisi-komisi yang berjumlah 45 orang dan setelah mendapatkan hasil barulah dibahas kembali oleh bagian anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Lampiran 5. Pertanyaan pendukung (Rancangan APBD, Penetapan APBD, Proses Pembahasan RAPBD dll)

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Interview
1	Irianto, (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung) Selasa, 06 Desember 2011	Tahap rancangan peraturan daerah yang dilakukan eksekutif?	<p>Rancangan Peraturan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD mengajukan draf ke bagian hukum untuk diteliti atau diproses dengan melampirkan naskah akademik. 2. Bagian hukum membuat undangan dengan tim teknis prolegda mengadakan rapat pembahasan Raperda untuk menerima masukan-masukan dari SKPD terkait. 3. Bagian hukum meminta kepada SKPD hasil rapat (pembahasan) untuk dicetak sebanyak 45 untuk anggota dewan berikut naskah akademik. 4. Bagian hukum membuat berita daerah penyampaian raperda untuk disampaikan kepada DPRD kota Bandar Lampung untuk dibahas. 5. Sebelum dibahas bagian hukum membuat pidato walikota tentang penyampaian raperda yang disampaikan kepada dewan. 6. Setelah dibahas oleh dewan, menerima untuk diproses atau dilanjutkan oleh eksekutif untuk dijadikan perda. 7. Bagian hukum mengajukan perda yang disetujui anggota dewan untuk di tanda tangani oleh walikota.
2	Febrilia Sastra Mega, SP. MT (Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Jumat, 09 Desember 2011	Bagaimanakah hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung berlangsung, apakah terjadi hanya secara formal seperti pertemuan/rapat resmi atau menggunakan juga jalur informal?	Formal, karena kurang dari 13 anggota dewan tidak hadir. Rapat dibatalkan, jumlah seluruh anggota adalah 45 anggota.

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Interview
3	Febrilia Sastra Mega, SP. MT (Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Jumat, 09 Desember 2011	Apakah dalam proses pembahasan RAPBD berlangsung demokratis, terbuka serta berlangsung dalam waktu yang tidak lama?	Demokratis dan tidak berlangsung dengan lama karena berlangsung 2 minggu.
4	Wilson Faisal SE, MM (Kepala Bagian BPKAD Kota Bandar Lampung) Jumat, 09 Desember 2011	Penyusunan RAPBD yang dilakukan BPKAD dan DPRD Kota Bandar Lampung	BPKAD menyusun perencanaan program kerja daerah dari bagian kelurahan, kecamatan, dan kota yang dihimpun menjadi SKPD setelah itu dilakukan pembahasan bersama DPRD. PU berinteraksi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketahui Sekretariat Daerah dan membawahi : Bappeda, Keuangan, Bagian Buku, dan Penyusunan Program) sama-sama membahas RAPBD dengan bagian anggaran.
5	Drs. Zainnudin (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Senin, 12 Desember 2011	Sejauh pengalaman bapak, bagaimana hubungan politik eksekutif dan legislatif dalam proses perumusan kebijakan daerah dan penetapan anggaran daerah?	1. Pengajuan KUA dan PPAS oleh walikota kepada DPRD penyampaian diawali oleh komisi-komisi dan hasil pembahasan dilaporkan kepada bagian anggaran DPRD. Selanjutnya bagian anggaran DPRD membahas lanjutan laporan tersebut bersama dengan TAPD. Setelah disepakati maka dilaksanakan rapat penyampaian laporan bagian anggran dan pembahasan KUA-PPAS. Setelah disepakati kemudian ditanda tangannya nota kesepakatan antara walikota dan pimpinan DPRD.

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Interview
5	Drs. Zainnudin (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Senin, 12 Desember 2011	Sejauh pengalaman bapak, bagaimana hubungan politik eksekutif dan legislatif dalam proses perumusan kebijakan daerah dan penetapan anggaran daerah?	<p>2. Walikota menyampaikan nota keuangan didalam forum rapat, setelah itu dilaksanakan rapat kedua untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas nota keuangan. Setelah itu dilaksanakan pembahasan oleh masing-masing komisi dan melibatkan pimpinan satuan kerja (Kepala Dinas, Badan, Kantor Camat dll).</p> <p>3. Kemudian dilaporkan bagian anggran menindaklanjuti rapat bersama TAPD lalu rapat paripurna sisahkan. Setelah pengesahan kemudian RAPBD disampaikan pada Bapak Gubernur melalui Tim Evaluasi Anggaran Propinsi dan diadakan evaluasi lalu disampaikan ke DPRD Kota Bandar Lampung dan Disahkan sebagai Perda.</p>
6	Drs. Zainnudin (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Senin, 12 Desember 2011	Bagaimanakah hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung berlangsung, apakah terjadi hanya secara formal seperti pertemuan/rapat resmi atau menggunakan juga jalur informal?	Rapat dilakukan dua jalur, formal dan informal. Formal: melalui rapat-rapat paripurna, rapat paripurna istimewa. Informal: Pak Walikota mempunyai acara triwulan (per tiga bulan sekali) dalam acara makan-makan bersama non agenda.
7	Drs. Zainnudin (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Senin, 12 Desember 2011	Apakah dalam proses pembahasan RAPBD berlangsung demokratis, terbuka serta berlangsung dalam waktu yang tidak lama?	<p>Iya Demokratis, karena semua anggota bangang maupun masyarakat luas bisa mengikuti pembahasan anggaran. Khusus anggota DPRD diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengkaji, menelaah, dan mengkritisi agar RAPBD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan Visi Misi Walikota 2. Disesuaikan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah)

No	Nama	Pertanyaan	Hasil interview
7	Drs. Zainudin (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung) Senin, 12 Desember 2011	Apakah dalam proses pembahasan RAPBD berlangsung demokratis, terbuka serta berlangsung dalam waktu yang tidak lama?	3. Disesuaikan Rencana Pembangunan Provinsi 4. Untuk mengimbangi antara belanja pegawai dan belanja publik sekaligus untuk mengakomodir program-program walikota yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan kebersihan, ekonomi kerakyatan, dan sosial keagamaan.
8	Benson Werta SH (anggota Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung) Selasa, 13 Desember 2011	Penetapan Peraturan Daerah	SKPD membuat rincian anggaran pendapatan, selanjutnya walikota menyampaikan pembahasan KUA dan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya walikota menyampaikan RAPBD beserta lampiran naskah akademis kepada DPRD dan dibahas bersama dalam rapat paripurna.